

Lampiran 1. Analisis kesesuaian proses pelaporan keuangan dengan peraturan yang berlaku

No.	Unit Akuntansi	Peraturan perundangan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008	Kondisi di BBKSDA Jawa Barat	Kesimpulan
1.	UAKPA	PMK No. 171/PMK.05/2007: UAKPA menyampaikan dokumen sumber perolehan Aset Tetap kepada UAKPB setiap terdapat transaksi perolehan Aset.	Petugas SAK menyampaikan dokumen sumber perolehan BMN berupa dokumen pengadaan, fotokopi SPM, fotokopi SP2D, faktur pembelian, kuitansi, surat perintah kerja kepada petugas SIMAK BMN setiap kali terdapat transaksi aset	Sesuai
2.	UAKPB	PMK No. 171/PMK.05/2007 : UAKPB mengirimkan ADK aset setiap bulan ke UAKPA sebagai bahan penyusunan neraca	ADK aset BMN disampaikan kepada petugas SAK setiap bulan untuk bahan menyusun neraca	Sesuai
3.	UAKPB	PMK No. 171/PMK.05/2007 : UAKPB menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap triwulan ke KPKNL sebagai bahan pemutakhiran data BMN	UAKPB menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke KPKNL dalam rangka pemutakhiran data BMN	Tidak sesuai

(lanjutan)

No.	Unit Akuntansi	Peraturan perundangan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008	Kondisi di BBKSDA Jawa Barat	Kesimpulan
4.	UAKPA	<p>PMK No. 171/PMK.05/2007 : UAKPA menyampaikan secara bulanan ke KPPN berupa LRA, Neraca dan ADK termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan dalam rangka melakukan rekonsiliasi data. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK.</p> <p>Perdirjen Perbendaharaan No. PER-51/PB/2008 pasal 7 ayat (1) huruf a) : Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA dilakukan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap bulan.</p>	<p>UAKPA melaksanakan rekonsiliasi data keuangan dengan KPPN Bandung II setiap bulan pada awal bulan berikutnya dengan membawa ADK. Hal – hal yang direkonsiliasi meliputi pagu belanja, pendapatan, realisasi belanja bruto, pengembalian belanja tahun berjalan, mutasi Uang Persediaan</p>	Sesuai
5.	UAKPA	<p>PMK No. 171/PMK.05/2007 : UAKPA menyampaikan ADK, LRA dan neraca termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara bulanan kepada UAPPA-W untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan. Untuk Semesteran</p>	<p>UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari <i>printout</i> LRA, Neraca, dengan melampirkan BAR dan ADK kepada UAPPA-W setiap bulan. Untuk semesteran dan tahunan ditambahkan CaLK.</p>	Sesuai

(lanjutan)

No.	Unit Akuntansi	Peraturan perundangan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008	Kondisi di BBKSDA Jawa Barat	Kesimpulan
		dan tahunan disertai dengan CaLK.		
6.	UAKPB	PMK No. 171/PMK.05/2007 : UAKPB menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke UAPPB-W untuk digabungkan setiap semester.	UAKPB menyampaikan laporan BMN berbentuk ADK dan <i>hardcopy</i> setiap semester kepada UAPPB-W dan UAPPB-E1	Tidak sesuai
7.	UAPPB-W	PMK No. 171/PMK.05/2007 : UAPPB-W menyampaikan laporan BMN kepada UAPPA-W setiap semester untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPPA-W	UAPPB-W menyampaikan laporan BMN kepada UAPPA-W setiap semester	Sesuai
8.	UAPPB-W	PMK No. 171/PMK.05/2007 : UAPPB-W melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Kanwil DJKN setiap semester	-	Tidak sesuai karena UAPPB-W tidak melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJKN

(lanjutan)

No.	Unit Akuntansi	Peraturan perundangan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008	Kondisi di BBKSDA Jawa Barat	Kesimpulan
9.	UAPPA-W	<p>PMK No. 171/PMK.05/2007 : UAPPA-W menyampaikan ADK termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara bulanan ke Kanwil Ditjen PBN cq. Bidang AKLAP, dan menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap triwulan dalam rangka rekonsiliasi tingkat wilayah. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK.</p> <p>Perdirjen Perbendaharaan No. PER-51/PB/2008 pasal 7 ayat (1) huruf b) : Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W dilakukan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan</p>	<p>UAPPA-W melakukan rekonsiliasi data keuangan dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Wilayah XII Jawa Barat setiap triwulan. Hal – hal yang direkonsiliasi meliputi pagu belanja, pendapatan, realisasi belanja bruto, pengembalian belanja tahun berjalan, pengembalian pendapatan, mutasi Uang Persediaan</p>	Sesuai
10.	UAPPA-W	<p>PMK No. 171/PMK.05/2007 : UAPPA-W menyampaikan LRA, Neraca dan ADK termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara triwulanan kepada UAPPA-E1 untuk digabungkan di tingkat eselon I. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK</p>	<p>ADK UAKPA yang diterima UAPPA-W digabungkan berdasarkan eselon I nya dan dikirim ke Eselon I terkait setiap bulan. Adapun <i>hardcopy</i> laporan keuangan dikirimkan setiap bulan dan triwulan.</p>	Sesuai

(lanjutan)

No.	Unit Akuntansi	Peraturan perundangan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008	Kondisi di BBKSDA Jawa Barat	Kesimpulan
11.	UAPPB-W	PMK No. 171/PMK.05/2007 : UAPPB-W menyampaikan ADK transaksi BMN dan laporan BMN ke UAPPB-E1 untuk digabungkan di tingkat eselon I setiap semester.	UAPPB-W menyampaikan ADK transaksi BMN (berupa CD atau lewat email) dan <i>hardcopy</i> nya kepada UAPPB-E1 terkait setiap semester untuk digabungkan di tingkat eselon I.	Sesuai

Lampiran 2. Analisis kesesuaian pengungkapan dalam Laporan Keuangan Tahun 2008 UAKPA Balai Besar KSDA Jawa Barat terhadap SAP

No.	Uraian	SAP	Laporan Keuangan UAKPA	Kesimpulan
1.	LRA	PSAP 2 paragraf 13 : ... LRA dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab - sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan	CaLK mengungkapkan mengenai komponen pendapatan dan belanja Balai Besar KSDA Jawa Barat pada tahun 2008, anggaran, realisasi, % realisasi, diagram komposisi realisasi pendapatan, diagram komposisi alokasi belanja, kenaikan/ penurunan realisasi dibandingkan periode pelaporan sebelumnya	Sesuai
2.	LRA	PSAP 2 paragraf 17 : Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam LRA, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada CaLK	CaLK mengungkapkan bahwa komponen penyusun pendapatan adalah Pendapatan Negara dan Hibah yang terdiri dari PNB. PNB tersebut bersumber dari penerimaan SDA dan PNB lainnya	Sesuai

(lanjutan)

No.	Uraian	SAP	Laporan Keuangan UAKPA	Kesimpulan
3.	LRA	PSAP 02 paragraf 18 : Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam LRA atau di CaLK. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam CaLK.	CaLK mengungkapkan informasi mengenai komponen belanja negara yaitu belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai.	Tidak sesuai karena jenis belanja yang diuraikan adalah jenis belanja ekonomi bukan fungsi
4.	CaLK	PSAP 04 paragraf 11 : CaLK harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Neraca, dan LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK	Terdapat pengungkapan mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, padahal pos tersebut tidak ada dalam Neraca	Tidak Sesuai
5.	CaLK	PSAP 04 paragraf 15 : Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada CaLK dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.	Informasi dalam CaLK disajikan dalam bentuk narasi, diagram pie, diagram batang, dan tabel.	Sesuai
6.	CaLK	PSAP 04 paragraf 34 : Dalam menyajikan CaLK, entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan	CaLK mengungkapkan dasar hukum penyusunan laporan keuangan dan	Sesuai

(lanjutan)

No.	Uraian	SAP	Laporan Keuangan UAKPA	Kesimpulan
		akuntansi.	kebijakan akuntansi yang digunakan.	
7.	CaLK	PSAP 04 paragraf 64 : CaLK harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti: (a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru; (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.	CaLK mengungkapkan bahwa telah terjadi penggabungan entitas yaitu BKSDA Jawa Barat I dan BKSDA Jawa Barat II menjadi Balai Besar KSDA Jawa Barat	Sesuai
8.	Persediaan	PSAP 05 paragraf 25 : Laporan keuangan mengungkapkan: (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; (b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau	CaLK mengungkapkan mengenai jumlah total persediaan.	Tidak sesuai karena informasi mengenai komponen persediaan, kondisi persediaan, dan bagaimana pengukurannya tidak ada.

(lanjutan)

No.	Uraian	SAP	Laporan Keuangan UAKPA	Kesimpulan
		diserahkan kepada masyarakat; (c) Kondisi persediaan		
9.	Aset Tetap	PSAP 07 paragraf 79 : Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (<i>carrying amount</i>); (b) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada), mutasi aset tetap lainnya; (c) Informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.	CaLK mengungkapkan bahwa aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan. Selain itu juga ada informasi mengenai rekonsiliasi jumlah pada awal dan akhir periode.	Tidak sesuai karena tidak ada informasi mengenai penyusutan aset tetap
10.	Aset Tetap	PSAP 07 paragraf 80 : Laporan keuangan juga harus mengungkapkan (a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; (c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan (d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.	Laporan Keuangan mengungkapkan mengenai komponen penyusutan aset tetap, kebijakan akuntansi terkait kapitalisasi. Adapun	Tidak sesuai karena tidak ada pengungkapan mengenai batasan hak milik atas aset dimaksud misalnya kelengkapan dokumen kepemilikan

Lampiran 3. Analisis kesesuaian pengungkapan dalam Laporan Keuangan Tahun 2008 UAPPA-W Balai Besar KSDA Jawa Barat terhadap SAP

No.	Uraian	SAP	Laporan Keuangan UAPPA-W	Kesimpulan
1.	LRA	PSAP 2 paragraf 13 : LRA dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan	CaLK mengungkapkan mengenai jumlah total anggaran dan realisasinya pada 11 satker, % realisasi anggaran, komponen penyusun pendapatan dan belanja, grafik komposisi realisasi belanja, % realisasi belanja	Tidak sesuai karena tidak diungkapkan mengenai penyebab perbedaan antara anggaran dan realisasi
2.	LRA	PSAP 2 paragraf 17 : Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam LRA, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada CaLK	CaLK mengungkapkan bahwa pendapatan negara dan hibah satker Dephut wilayah Jawa Barat bersumber dari PNBP yaitu PNBP lainnya (penjualan aset yang dihapuskan, pendapatan sewa, pendapatan bidang PHKA, penerimaan kembali belanja pegawai TAYL, pelunasan piutang/ TGR)	Sesuai

(lanjutan)

No.	Uraian	SAP	Laporan Keuangan UAPPA-W	Kesimpulan
3.	LRA	PSAP 02 paragraf 18 : Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam LRA atau di CaLK. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam CaLK.	CaLK menyajikan informasi mengenai komponen belanja UAPPA-W yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja pegawai terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, belanja honorarium, dan belanja lembur. Belanja barang terdiri dari belanja barang operasional, non operasional, jasa, barang pemeliharaan, dan perjalanan dinas. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, pemeliharaan yang dikapitalisasi, dan fisik lainnya.	Tidak sesuai karena jenis belanja tersebut merupakan belanja ekonomi bukan belanja fungsi
4.	CaLK	PSAP 04 paragraf 11 : CaLK harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Neraca, dan LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat komponen PNPB lainnya yang tidak diungkapkan ▪ Tidak ada pengungkapan mengenai Kas di Bendahara Penerimaan padahal di Neraca terlihat perubahan kondisi kas tersebut antara tahun 2007 dan 2008 	Tidak Sesuai

(lanjutan)

No.	Uraian	SAP	Laporan Keuangan UAPPA-W	Kesimpulan
5.	CaLK	PSAP 04 paragraf 15 : Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada CaLK dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.	Informasi dalam CaLK disajikan dalam bentuk narasi, diagram pie, diagram batang, dan tabel namun grafik mengenai sebaran persediaan per satuan kerja tidak informatif karena tidak mencantumkan nilai persediaannya.	Tidak sesuai
	CaLK	PSAP 04 paragraf 34 : Dalam menyajikan CaLK, entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.	CaLK mengungkapkan dasar hukum penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan.	Sesuai
6.	CaLK	PSAP 04 paragraf 64 : CaLK harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti: (a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru; (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.	CaLK mengungkapkan mengenai kebijakan pemerintah terkait pemotongan alokasi anggaran satuan kerja sebesar 15%. CaLK juga mengungkapkan bahwa beberapa kegiatan tidak terealisasi karena anggarannya tidak mencukupi.	Sesuai

(lanjutan)

No.	Uraian	SAP	Laporan Keuangan UAPPA-W	Kesimpulan
7.	Persediaan	PSAP 05 paragraf 25 : Laporan keuangan mengungkapkan: (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; (b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; (c) Kondisi persediaan;	CaLK hanya mengungkapkan mengenai jumlah total persediaan.	Tidak sesuai karena informasi mengenai komponen persediaan, kondisi persediaan, dan bagaimana pengukurannya tidak ada.
8.	Aset Tetap	PSAP 07 paragraf 79 : Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (<i>carrying amount</i>); (b) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada), mutasi aset tetap lainnya; (c) Informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat	Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan.	Tidak sesuai karena Tidak ada penjelasan lengkap mengenai perubahan aset tetap (penambahan, pelepasan, maupun penghapusan). Tidak ada informasi mengenai penyusutan karena data BMN yang digunakan

(lanjutan)

No.	Uraian	SAP	Laporan Keuangan UAPPA-W	Kesimpulan
		bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.		belum merupakan hasil revaluasi.
9.	Aset Tetap	PSAP 07 paragraf 80 : Laporan keuangan juga harus mengungkapkan (a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; (c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan (d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.	Laporan Keuangan mengungkapkan mengenai komponen penyusun aset tetap, kebijakan akuntansi terkait kapitalisasi.	Tidak sesuai karena pengungkapan mengenai batasan hak milik atas aset dimaksud misalnya kelengkapan dokumen kepemilikan untuk masing – masing satuan kerja belum diungkapkan.

Lampiran 4. Analisis kesesuaian pengungkapan dalam Laporan Keuangan Tahun 2008 UAKPA Balai Besar KSDA Jawa Barat terhadap Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008

No.	Uraian	Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008	Laporan Keuangan UAKPA	Kesimpulan
1.	Laporan Barang	<p>Pasal 3 ayat (1) : Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna Barang Milik Negara (BMN) wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Barang Pengguna Semester/ Tahunan.</p> <p>Pasal 8 ayat (2) : Laporan Barang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) disajikan sebagai lampiran CaLK.</p> <p>Lampiran III : Laporan barang tahunan tingkat satuan kerja yang disampaikan adalah LBKP intrakomptabel per sub – sub kelompok barang satuan kerja – tahunan, Laporan Barang-Barang Bersejarah per sub – sub kelompok barang satuan kerja – tahunan, LKB satuan kerja – tahunan, LKB barang bersejarah satuan kerja – tahunan</p>	Laporan barang tahunan terdiri dari LBKP tahunan intrakomptabel, LBKP tahunan ekstrakomptabel, LBKP tahunan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel, Laporan posisi barang di Neraca	Tidak sesuai karena tidak menyertakan LKB

(lanjutan)

No.	Uraian	Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008	Laporan Keuangan UAKPA	Kesimpulan
2.	Temuan BPK dan tindak lanjutnya, Rekening pemerintah	Pasal 12 : Kementerian Negara/ Lembaga harus mengungkapkan dalam Laporan Keuangannya: a) Temuan BPK dan tindak lanjut atas temuan dimaksud dalam CaLK; b) Rekening pemerintah yang dikelola.	Tidak melampirkan rekening pemerintah yang dikelola	Tidak sesuai
3.	Sistematika	Lampiran IVa : Sistematika penyajian laporan keuangan satuan kerja adalah Sampul Luar, Sampul Dalam, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, daftar Grafik, Daftar Lampiran, Daftar Singkatan, Pernyataan Tanggung Jawab, Ringkasan, LRA satuan kerja, Neraca, LRA pendapatan dan belanja, CaLK, Lampiran laporan keuangan, Laporan lain sebagai pendukung CaLK	Sistematika laporan keuangan : Sampul luar, Sampul dalam, Kata pengantar, Daftar isi, Daftar singkatan, Indeks CaLK, Pernyataan tanggung jawab, Ringkasan, CaLK, LRA satuan kerja, Neraca, lampiran	Tidak sesuai
4.	Lampiran laporan keuangan	Lampiran IVa : ▪ Laporan-laporan pendukung sebagai lampiran yaitu LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan, LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja, Neraca Percobaan	Lampiran Laporan Keuangan : LRA Belanja satuan kerja melalui KPPN, LRA Pendapatan Negara dan Hibah satuan kerja melalui KPPN, Laporan realisasi pengembalian belanja satuan kerja melalui KPPN, Laporan barang	Tidak sesuai karena tidak menyertakan neraca percobaan, LKB, rincian saldo awal, serta laporan

(lanjutan)

No.	Uraian	Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008	Laporan Keuangan UAKPA	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan barang yaitu Laporan Barang Tahunan, Laporan Kondisi Barang, Rincian Saldo Awal ▪ Laporan Keuangan BLU ▪ Laporan Rekening Pemerintah ▪ Tindak Lanjut Atas Temuan BPK ▪ Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK 	sebagaimana no.1	rekening pemerintah
5.	Lampiran lain pendukung CaLK	LBKP persediaan, dll.	Tidak ada	Tidak sesuai
6.	Ringkasan	Lampiran IVa : Ringkasan memuat informasi tentang Ringkasan LRA, Neraca, dan CaLK	Ringkasan memuat informasi tentang ringkasan LRA, Neraca, dan CaLK.	Sesuai
7.	Pendahuluan CaLK	<p>Lampiran IVa :</p> <p>Pendahuluan CaLK memuat tentang Penjelasan Umum yaitu Dasar Hukum, Kebijakan Teknis, Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan, dan Kebijakan Akuntansi.</p> <p>Dalam kebijakan teknis diungkapkan mengenai</p>	Pendahuluan CaLK memuat tentang Penjelasan Umum yaitu Dasar Hukum, Kebijakan Teknis, Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan, dan Kebijakan Akuntansi. Namun di dalam Kebijakan teknis tidak menyebutkan tentang Renstra satker, program yang	Tidak Sesuai

(lanjutan)

No.	Uraian	Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008	Laporan Keuangan UAKPA	Kesimpulan
		Renstra satuan kerja, hal – hal yang terkait pendapatan (realisasi pendapatan, uraian per jenis pendapatan, perbandingannya dengan tahun anggaran yang lalu, penyebab kenaikan/ penurunan realisasi), belanja (realisasi belanja, uraian per jenis belanja, perbandingan dengan realisasi tahun anggaran yang lalu, penyebab kenaikan/penurunan realisasi, program yang dilaksanakan satker, realisasi belanja program, dan capaiannya	dilaksanakan, dan realisasi belanja program serta capaiannya	
8.	Penjelasan atas pos – pos LRA	Lampiran IVa : Penjelasan atas pos – pos LRA memuat informasi tentang : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan umum LRA : menyebutkan nilai anggaran dan realisasinya dalam rupiah, serta % realisasi ▪ Penjelasan per pos LRA berisi penjelasan tentang jumlah rupiah dan persentase realisasi, grafik komposisi, kenaikan dan penurunan realisasi dinyatakan dalam %, penjelasan terjadinya kenaikan dan penurunan realisasi dibandingkan periode pelaporan sebelumnya, rincian komponen 	Mengungkapkan tentang nilai anggaran dan realisasinya dalam rupiah, dan % realisasi Kenaikan/ penurunan Penerimaan SDA, PNBP lainnya, belanja pegawai, dan belanja barang dinyatakan dalam rupiah. Tidak ada penjelasan mengenai penyebab kenaikan/ penurunan	Sesuai Tidak sesuai

(lanjutan)

No.	Uraian	Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008	Laporan Keuangan UAKPA	Kesimpulan
		penyusun pos LRA	pendapatan negara dan hibah, PNBP (penerimaan SDA, dan PNBP lainnya), belanja barang, dan belanja modal.	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Catatan penting lainnya memuat hal – hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, penyebab perbedaan material antara anggaran dan realisasinya serta daftar rinci mengenai angka-angka yang dianggap perlu dijelaskan 	Mengungkapkan tentang adanya revisi DIPA tahun 2008, perubahan bagan akun pada DIPA (Belanja Uang Honor Tetap untuk TPPK) sehingga perlu revisi SPM, beberapa bank untuk menyetorkan pendapatan tidak bisa mencantumkan NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) dan NTB (Nomor Transaksi Bank) yang diperlukan untuk rekonsiliasi	Sesuai
9.	Penjelasan atas pos – pos Neraca	Lampiran IVa : Penjelasan atas pos – pos Neraca memuat informasi tentang : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan umum neraca mengungkapkan komposisi neraca per tanggal pelaporan, perbandingan komposisi dengan tanggal pelaporan sebelumnya, kenaikan/ penurunan komposisi dinyatakan dalam %, grafik komposisi neraca 	Kenaikan/ penurunan komposisi neraca dinyatakan dalam rupiah	Tidak sesuai

(lanjutan)

No.	Uraian	Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008	Laporan Keuangan UAKPA	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan per pos neraca mengungkapkan tentang pos – pos neraca, perbandingannya dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Penjelasan tentang aset lancar, aset tetap (nilai aset tetap, % kenaikan/ penurunan, perbandingannya dengan periode sebelumnya, perbandingan dalam grafik, penjelasan penambahan saldo awal, perolehan, perubahan dan penghapusan, asal perolehan aset yang bukan dari belanja modal), kewajiban, ekuitas. ▪ Catatan penting lainnya : hal-hal yang berhubungan dengan neraca, misal Rekening-rekening yang dikelola, Aset-aset bermasalah, hambatan dalam penyusunan Laporan Keuangan, transaksi yang belum /tidak dapat diinput dan hal-hal lain 	<p>Kenaikan/ penurunan aset tetap dinyatakan dalam rupiah, jumlah persediaan yang diungkapkan hanya untuk tanggal pelaporan ini tidak dibandingkan dengan sebelumnya, tidak ada pengungkapan mengenai sumber perolehan aset, tidak ada pengungkapan penyebab perbedaan nilai aset dan nilai belanja modal (lampiran 8)</p> <p>Saldo awal nilai aset belum ditentukan karena hasil revaluasi aset dari DJKN belum terbit</p>	<p>Tidak sesuai</p> <p>Sesuai</p>
10.	Pengungkapan penting lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Temuan dan tindak lanjut temuan BPK : menjelaskan temuan-temuan BPK dan tindak lanjut yang telah dilakukan, daftar temuan dan tindak lanjutnya dilampirkan 	Tidak ada	Sesuai karena sebelumnya tidak diperiksa oleh BPK

(lanjutan)

No.	Uraian	Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008	Laporan Keuangan UAKPA	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekening pemerintah : menjelaskan rekening pemerintah yang dimiliki yang dipertahankan, ditutup dan lain-lain, daftar rekening dilampirkan. ▪ Pengungkapan lain – lain : menjelaskan hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan LRA dan Neraca namun mempengaruhi Laporan Keuangan, misalnya reorganisasi, force majeure, sengketa peradilan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Satker 	<p>Tidak dilampirkan daftar rekening yang dikelolanya</p> <p>Pengungkapan bahwa nilai aset dalam neraca belum sesuai dengan nilai total aset BBKSDA Jawa Barat a.l. karena belum ada serah terima barang dari KPA ke pejabat strukturalnya sehingga penginputan ke dalam SIMAK BMN terhambat</p>	<p>Tidak sesuai</p> <p>Sesuai</p>

Lampiran 5. Analisis kesesuaian pengungkapan dalam Laporan Keuangan Tahun 2008 UAPPA-W Balai Besar KSDA Jawa Barat terhadap Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008

No.	Uraian	Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008	Laporan Keuangan UAPPA-W	Kesimpulan
1.	Laporan Barang	<p>Pasal 3 ayat (1) : Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna Barang Milik Negara (BMN) wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Barang Pengguna Semester/ Tahunan.</p> <p>Pasal 8 ayat (2) : Laporan Barang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) disajikan sebagai lampiran CaLK.</p> <p>Lampiran III : Laporan barang tahunan tingkat wilayah yang disampaikan meliputi Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Intrakomptabel per sub kelompok barang wilayah – tahunan, Laporan barang – barang bersejarah per sub Kelompok Barang Wilayah – tahunan,</p>	<p>Laporan Barang tahunan yang disampaikan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan BMN intrakomptabel UAPPA-W dan Laporan posisi BMN di Neraca (BPPK Bogor dan BPPK Kadipaten) ▪ Laporan BMN ekstrakomptabel UAPPA-W (BPPK Bogor dan BPPK Kadipaten) ▪ Laporan BMN intrakomptabel UAPPA-W dan Laporan posisi BMN di Neraca (BPDAS cimanuk citanduy, BPDAS Citarum-Ciliwung, dan BPTH Jawa-Madura) 	Tidak sesuai karena tidak menyertakan LKB.

(lanjutan)

No.	Uraian	Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008	Laporan Keuangan UAPPA-W	Kesimpulan
		LKB wilayah – tahunan, dan LKB barang bersejarah wilayah – tahunan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan BMN ekstrakomptabel UAPPA-W (BPDAS cimanuk citanduy, BPDAS Citarum-Ciliwung, dan BPTH Jawa-Madura) ▪ Laporan BMN intrakomptabel UAPPA-W dan Laporan posisi BMN di Neraca (BBKSDA Jawa Barat, BBTN G. Gede Pangrango, BTN G. Halimun. dan BTN G. Ciremai) ▪ Laporan BMN ekstrakomptabel UAPPA-W (BBKSDA Jawa Barat, BBTN G. Gede Pangrango, BTN G. Halimun. dan BTN G. Ciremai) ▪ Laporan BMN intrakomptabel UAPPA-W dan Laporan posisi BMN di Neraca (BPTP Bogor, dan BPK Ciamis) ▪ Laporan BMN ekstrakomptabel UAPPA-W (BPTP Bogor, dan BPK Ciamis) 	
2.	Temuan BPK dan tindak	Pasal 12 : Kementerian Negara/ Lembaga harus mengungkapkan dalam Laporan Keuangannya:	Tidak ada pengungkapan tentang rekening pemerintah yang dikelola oleh	Tidak sesuai

(lanjutan)

No.	Uraian	Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008	Laporan Keuangan UAPPA-W	Kesimpulan
	lanjutnya, Rekening pemerintah	a) Temuan BPK dan tindak lanjut atas temuan dimaksud dalam CaLK; b) Rekening pemerintah yang dikelola.	11 satker di bawah UAPPA-W	
3.	Sistematika CaLK	Lampiran IVa : Sistematika penyajian laporan keuangan satuan kerja adalah Sampul Luar, Sampul Dalam, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, daftar Grafik, Daftar Lampiran, Daftar Singkatan, Pernyataan Tanggung Jawab, Ringkasan, LRA UAPPA-W, Neraca, LRA pendapatan dan belanja, CaLK, Lampiran laporan keuangan, Laporan lain sebagai pendukung CaLK	Sistematika laporan keuangan yaitu Sampul luar, Sampul dalam, Kata Pengantar, Daftar singkatan, Pernyataan tanggung jawab, Daftar isi, Ringkasan, LRA, Neraca, CaLK, Lampiran laporan keuangan	Tidak sesuai karena tidak ada daftar tabel, daftar grafik, daftar lampiran
4.	Lampiran laporan keuangan	Lampiran IVa : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan-laporan pendukung sebagai lampiran yaitu LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan, LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja, Neraca Percobaan ▪ Laporan barang yaitu Laporan Barang Tahunan, Laporan Kondisi Barang, Rincian Saldo Awal ▪ Laporan Keuangan BLU 	Laporan keuangan melampirkan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ LRA pendapatan negara dan hibah wilayah melalui KPPN ▪ LRA pengembalian pendapatan dan hibah wilayah ▪ LRA belanja wilayah melalui KPPN ▪ LRA pengembalian belanja wilayah melalui KPPN ▪ Neraca percobaan ▪ Berita Acara Rekonsiliasi 	Tidak sesuai karena belum melampirkan LKB, Rincian saldo awal, Laporan rekening pemerintah

(lanjutan)

No.	Uraian	Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008	Laporan Keuangan UAPPA-W	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Rekening Pemerintah ▪ Tindak Lanjut Atas Temuan BPK ▪ Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan barang tahunan 	
5.	Lampiran lain pendukung CaLK	Laporan Barang Persediaan Wilayah, dll.	-	Tidak sesuai karena tidak melampirkan laporan persediaan
6.	Ringkasan	Lampiran IVa : Ringkasan memuat informasi tentang Ringkasan LRA, Neraca, dan CaLK	Ringkasan memuat mengenai ringkasan LRA, Neraca, dan CaLK	Sesuai
7.	Pendahuluan CaLK	Lampiran IVa : Pendahuluan CaLK memuat tentang Penjelasan Umum yaitu Dasar Hukum, Kebijakan Teknis, Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan, dan Kebijakan Akuntansi.	Penjelasan Umum mengungkapkan tentang Dasar Hukum, pendekatan penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi,	Tidak sesuai karena tidak mengungkapkan tentang Kebijakan teknis
8.	Penjelasan atas pos – pos LRA	Lampiran IVa : Penjelasan atas pos – pos LRA memuat informasi tentang :		

(lanjutan)

No.	Uraian	Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008	Laporan Keuangan UAPPA-W	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan umum LRA : menyebutkan nilai anggaran dan realisasinya dalam rupiah, serta % realisasi. 	Penjelasan umum LRA berisi informasi tentang total anggaran, realisasi, dan % realisasi untuk UPT Dephut lingkup prov. Jawa Barat	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan per pos LRA berisi penjelasan tentang jumlah rupiah dan persentase realisasi, grafik komposisi, penjelasan terjadinya kenaikan dan penurunan realisasi dibandingkan periode pelaporan sebelumnya, rincian komponen penyusun pos LRA, ▪ Catatan penting lainnya memuat hal – hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, penyebab perbedaan material antara anggaran dan realisasinya serta daftar rinci mengenai angka-angka yang dianggap perlu dijelaskan 	<p>Penjelasan per pos LRA mengungkapkan bahwa Pendapatan negara dan hibah berasal dari PNBП yang seluruhnya merupakan PNBП lainnya, jumlah komponen penyusun pendapatan dalam rupiah. Selain itu juga mengungkapkan tentang belanja negara dan komponen penyusunnya, realisasi belanja, grafik komposisi belanja</p> <p>Catatan penting mengungkapkan bahwa terjadi pemotongan anggaran sebesar 15 % terhadap semua satker karena kebijakan pemerintah, tidak terlaksananya beberapa kegiatan karena pencairan sumber dana (PNBП) bertahap yang tidak mencukupi kebutuhannya.</p>	<p>Tidak sesuai karena tidak ada penjelasan mengenai kenaikan dan penurunan realisasi</p> <p>Sesuai</p>
	Penjelasan atas pos – pos Neraca	<p>Lampiran IVa :</p> <p>Penjelasan atas pos – pos Neraca memuat informasi tentang :</p>		

(lanjutan)

No.	Uraian	Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008	Laporan Keuangan UAPPA-W	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan Umum neraca mengungkapkan komposisi neraca per tanggal pelaporan, perbandingan komposisi dengan tanggal pelaporan sebelumnya, perbedaan komposisi dinyatakan dalam %, grafik komposisi neraca 	<p>Penjelasan umum neraca mengungkapkan tentang komposisi neraca per 31 desember 2008 dan per 31 desember 2007; perbandingannya dalam %; komponen penyusun aset, kewajiban, dan ekuitas</p>	<p>Sesuai</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan per pos neraca mengungkapkan tentang setiap pos yang ada pada neraca (aset lancar, aset tetap, aset lainnya, kewajiban, ekuitas dana), perbandingannya dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Selain itu juga mengungkapkan tentang rincian saldo kas di Bendahara Pengeluaran per-satuan kerja, rincian saldo kas di Bendahara Penerimaan per-satuan kerja, lampiran laporan stock opname persediaan, nilai aset tetap, perbandingannya dengan periode sebelumnya, perbandingan dalam grafik, penjelasan penambahan saldo awal, perolehan, perubahan dan penghapusan, asal perolehan aset yang bukan dari belanja modal. 	<p>Penjelasan per pos neraca mengungkapkan tentang komponen penyusun aset lancar, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, ekuitas dana lancar, ekuitas dana diinvestasikan. Saldo kas di bendahara pengeluaran menjelaskan tentang kondisi di BPDAS Citarum Ciliwung dan BPTH Jawa Madura. Bagian lancar tagihan TGR menjelaskan tentang kondisi di BPDAS Cimanuk Citanduy. Persediaan menjelaskan tentang jumlah total. Aset tetap menjelaskan komponen aset tetap secara umum, jumlah per 31 des 2008 dan 31 des 2007, % kenaikan/ penurunan. Aset lainnya menjelaskan tentang software di BPTH Jawa Madura. Kewajiban jangka pendek berupa uang muka dari KPPN yang ada di BPDAS</p>	<p>Tidak sesuai karena rincian informasi belum disajikan per satuan kerja baik itu saldo kas di bendahara pengeluaran, persediaan, maupun aset tetap. Penjelasan tentang asal perolehan aset tetap juga belum ada.</p>

(lanjutan)

No.	Uraian	Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008	Laporan Keuangan UAPPA-W	Kesimpulan
			Citarum Ciliwung dan BPTH Jawa Madura.	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Catatan penting lainnya : hal-hal yang berhubungan dengan neraca, misal Rekening-rekening yang dikelola, Aset-aset bermasalah, hambatan dalam penyusunan Laporan Keuangan, transaksi yang belum /tidak dapat diinput dan hal-hal lain 	Pengungkapan bahwa terdapat selisih nilai persediaan dan nilai aset tetap antara neraca dan laporan BMN. Hal ini dikarenakan data persediaan tidak bisa digabungkan dalam SIMAK BMN, dan keterlambatan satker menyampaikan laporan BMN.	Sesuai
	Pengungkapan penting lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Temuan dan tindak lanjut temuan BPK : menjelaskan temuan-temuan BPK dan tindak lanjut yang telah dilakukan, daftar temuan dan tindak lanjutnya dilampirkan ▪ Rekening pemerintah : menjelaskan rekening pemerintah yang dimiliki yang dipertahankan, ditutup dan lain-lain, daftar rekening dilampirkan. ▪ Pengungkapan lain – lain : menjelaskan hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan LRA dan Neraca namun mempengaruhi Laporan Keuangan, misalnya reorganisasi, force majeure, sengketa peradilan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Satker 	- - -	Sesuai karena tidak ada pemeriksaan oleh BPK sebelumnya Tidak sesuai Tidak sesuai karena adanya penggabungan BKSDA Jawa Barat I dan BKSDA Jawa Barat II menjadi Balai Besar KSDA

(lanjutan)

No.	Uraian	Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008	Laporan Keuangan UAPPA-W	Kesimpulan
				Jawa Barat tidak diungkapkan di sini

Lampiran 6. Perbandingan Nilai Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2008 pada Laporan Keuangan Tahun 2008 Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagai UAKPA dengan Hasil Revaluasi

Uraian	Hasil Revaluasi		Neraca	
	Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)
Tanah	24.934	10.914.584.000	25.09 4	2.036.834.627
Gedung dan bangunan	111	5.096.442.000	92	2.593.576.400
Peralatan dan mesin	10.475	5.779.054.250	1.347	6.478.653.975
Jalan, irigasi, dan jaringan	8	57.600.000	8	13.433.000
Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0	0
Aset tetap lainnya	63	6.053.000	110	10.675.500
Total Aset Tetap		21.853.733.250		11.133.173.502

Lampiran 7. Ketidaksesuaian antar Bagian dalam Laporan Keuangan Tahun 2008 Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagai UAKPA

a. Perbedaan nilai realisasi PNBP antara LRA dengan Ringkasan

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi menurut		Selisih
	LRA	Ringkasan	
Pendapatan Negara dan Hibah	1.507.272.056	1.507.002.295	269.761
Penerimaan Pajak	0	0	0
PNBP	1.507.272.056	1.507.002.295	269.761
Belanja RM	14.553.376.550	14.553.376.550	0
Belanja Pinjaman LN	0	0	0
Belanja Hibah	0	0	0

b. Perbedaan nilai pendapatan antara LRA dengan CaLK sehingga terdapat selisih sebesar Rp**269.761,-**

Kutipan CaLK :

“ Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2008 terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp 0,- atau mencapai 0 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.507.002.295,- atau mencapai 80,71 persen dari anggaran serta Penerimaan Hibah sebesar Rp0,- atau mencapai 0 persen dari yang dianggarkan.”

Informasi PNBP antara LRA dengan CaLK

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi menurut		Selisih
	LRA	CaLK	
Pendapatan Negara dan Hibah	1.507.272.056	1.507.002.295	269.761

c. Isi penjelasan umum LRA (CaLK) vs LRA

Realisasi Menurut	
Penjelasan Umum LRA (CaLK)	LRA
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
Penerimaan Pajak	Penerimaan Dalam Negeri
PNBP	Penerimaan Perpajakan
Penerimaan Hibah	PNBP
	Hibah
Realisasi Belanja Negara	Realisasi Belanja
Belanja Rupiah Murni	Rupiah Murni
Belanja Pinjaman LN	Pinjaman LN
Belanja Rupiah Pendamping	Hibah
Belanja Hibah	
Belanja PNBP	
Belanja BLU	

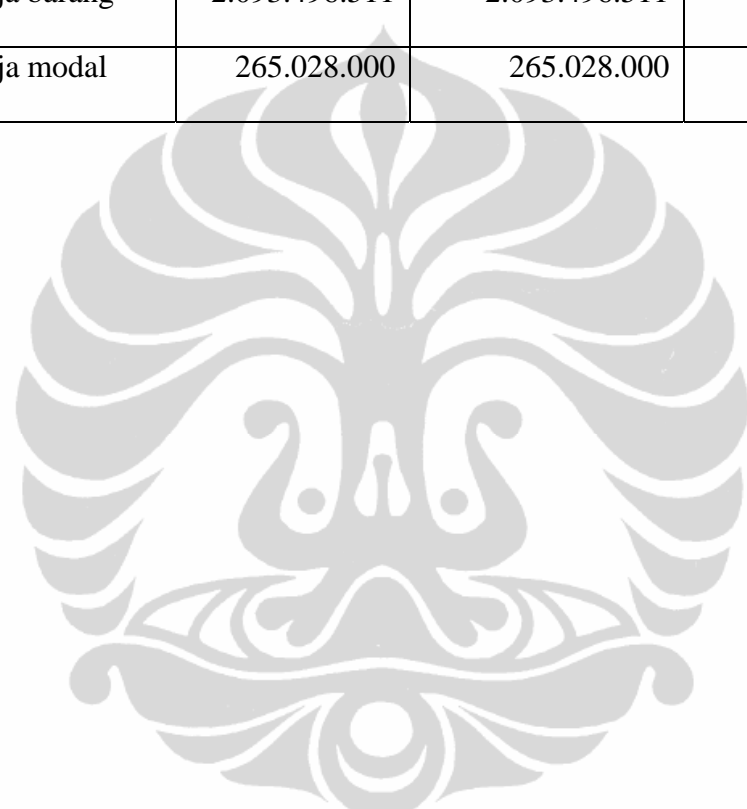
d. Realisasi nilai pendapatan negara dan hibah antara LRA dengan CaLK khususnya pos PNBP dengan selisih sebesar Rp269.761,00 dan pos belanja RM sebesar Rp966.308.000,00

Uraian	Realisasi menurut				Selisih	
	LRA		Penjelasan Umum CaLK			
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah						
Penerimaan Pajak	-	-	-	-		
PNBP	1.507.272.056	80,72	1.507.272.056	80,71	269.761	0,01
Penerimaan Hibah	-	-	-	-	-	-
Realisasi Belanja						
Belanja Rupiah Murni (RM)	14.558.376.550	101,28	13.592.068.550	103,36	966.308.000	(1,56)
Belanja Pinjaman LN	-	-	-	-		
Belanja Rupiah Pendamping	Tidak ada pos tersebut	-	-	-		
Belanja Hibah	-	-	-	-		
Belanja PNBP	Tidak ada pos tersebut	-	961.308.000	79,46		
Belanja BLU	Tidak ada pos tersebut	-	-	-		

e. Realisasi nilai belanja pegawai pada LRA vs CaLK

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi menurut		Selisih
	LRA	CaLK	
Belanja	14.553.376.550	13.517.805.547	1.035.571.003
Belanja pegawai	12.194.852.039	11.159.281.036	1.035.571.003
Belanja barang	2.093.496.511	2.093.496.511	0
Belanja modal	265.028.000	265.028.000	0



Lampiran 8. Perbandingan antara Nilai Aset Tetap dengan Nilai Belanja Modal menurut Laporan Keuangan Tahun 2008 Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagai UAKPA

a. Perubahan Nilai Aset Tetap dari Tahun 2007 ke Tahun 2008

No	Uraian	Tahun 2008	Tahun 2007	Perubahan Nilai Aset Tetap (Rp)
1.	Tanah	1.536.834.627	2.036.834.627	(500.000.000)
2.	Peralatan dan mesin	7.097.164.272	6.478.653.975	4.618.510.297
3.	Gedung dan bangunan	2.742.877.400	2.593.573.400	149.304.000
4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	13.433.000	13.433.000	-
5.	Aset lainnya	10.675.500	10.675.500	-
	Total	11.400.984.799	11.133.170.502	267.814.297

b. Nilai Belanja Modal Tahun 2008

No	Uraian	Tahun 2008
1.	Belanja modal tanah	-
2.	Belanja modal peralatan dan mesin	265.028.000
3.	Belanja modal gedung dan bangunan	-
4.	Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan	-
5.	Belanja modal fisik lainnya	-
	Total	265.028.000

Lampiran 9. Perbandingan antara Daftar Isi dengan Isi Laporan Keuangan Tahun 2008 Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagai UAPPA-W Departemen Kehutanan Provinsi Jawa Barat

Daftar Isi	Isi Laporan Keuangan
Kata Pengantar	Kata Pengantar
<i>Indeks Singkatan</i>	<i>Daftar Singkatan</i>
Pernyataan Tanggung Jawab	Pernyataan Tanggung Jawab
Daftar Isi	Daftar Isi
I. Ringkasan	I. Ringkasan
II. Laporan Realisasi Anggaran	II. Laporan Realisasi Anggaran
III. Neraca	III. Neraca
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	IV. Catatan atas Laporan Keuangan
A. Penjelasan Umum	A. Penjelasan Umum
A.1. Dasar Hukum	A.1. Dasar Hukum
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
A.3. Kebijakan Akuntansi	A.3. Kebijakan Akuntansi
B. Penjelasan atas Pos-Pos LRA	B. Penjelasan atas Pos-Pos LRA
B.1. Penjelasan Umum LRA	B.1. Penjelasan Umum LRA
B.2. Penjelasan per Pos LRA	B.2. Penjelasan per Pos LRA
<i>B.3. Catatan Penting/ Pengungkapan lainnya</i>	<i>B.3. Catatan Penting lainnya</i>
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
C.1. Posisi Keuangan secara umum	C.1. Penjelasan Umum Neraca
C.2. Penjelasan per Pos Neraca	C.2. Penjelasan per Pos Neraca
<i>C.3. Catatan Penting atau Pengungkapan lainnya</i>	<i>C.3. Catatan Penting lainnya</i>

(lanjutan)

Daftar Isi	Isi Laporan Keuangan
Laporan-laporan Pendukung	Laporan-laporan Pendukung
- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
- Neraca Percobaan	- Neraca Percobaan
	- <i>Berita Acara Rekonsiliasi</i>
Laporan Barang Pembantu Pengguna Barang Wilayah	Laporan BMN
- Laporan Barang Pembantu Pengguna Barang Wilayah Semesteran/Tahunan	- Laporan BMN (Intrakomptabel) UAPPB-W (BPPK Bogor, BPPK Kadipaten)
	- <i>Laporan Posisi BMN di Neraca (Setjen)</i>
	- Laporan BMN (Ekstrakomptabel) UAPPB-W (BPPK Bogor, BPPK Kadipaten)
	- Laporan BMN (Intrakomptabel) UAPPB-W (BPDAS Cimanuk-Citanduy, BPDAS Citarum-Ciliwung, BPTH Jawa-Madura)
	- <i>Laporan Posisi BMN di Neraca (Ditjen RLPS)</i>
	- Laporan BMN (Ekstrakomptabel) UAPPB-W (BPDAS Cimanuk-Citanduy, BPDAS Citarum-Ciliwung, BPTH Jawa-Madura)
	- Laporan BMN (Intrakomptabel) UAPPB-W (BBKSDA Jawa Barat, BBTN Gunung Gede Pangrango, BTN Gunung Halimun, BTN Gunung Ciremai)
	- <i>Laporan Posisi BMN di Neraca (Ditjen PHKA)</i>
	- Laporan BMN (Intrakomptabel) UAPPB-W (BPTP Bogor, BPK Ciamis)
	- <i>Laporan Posisi BMN di Neraca (Badan Litbang Kehutanan)</i>

Lampiran 10. Ketidaksesuaian antar Bagian dalam Laporan Keuangan Tahun 2008 Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagai UAPPA-W

a. Nilai Anggaran Belanja RM pada LRA vs Ringkasan

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran menurut		Selisih
	LRA	Ringkasan	
Pendapatan Negara dan Hibah	2.199.719.800	2.199.719.800	0
Belanja	88.214.956.000	89.160.471.000*	(945.515.000)
Belanja RM	87.664.956.000	88.214.956.000	(550.000.000)
Belanja Pinjaman LN	0	0	0
Belanja Hibah	550.000.000	550.000.000	0

Keterangan :

* terdapat kesalahan penghitungan total belanja yang seharusnya Rp88.764.956.000,-

b. Perbandingan Nilai Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2008 vs Laporan BMN

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai menurut		Selisih
	Neraca	Laporan BMN	
Aset Tetap	110.001.355.994	109.570.689.894	430.666.100
Tanah	8.883.500.217	8.883.500.217	0
Alat dan mesin	45.334.249.802	45.386.223.702	(51.973.900)
Gedung dan bangunan	48.546.218.593	48.063.568.593	482.650.000
Jalan, irigasi dan jaringan	6.222.947.190	6.222.947.190	0
Aset tetap lainnya	1.014.440.192	1.014.440.192	0

c. Perbandingan Nilai Belanja Negara pada LRA vs CaLK Tahun 2008

1) Perbandingan Anggaran Belanja Negara

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Menurut		Selisih
	LRA	CaLK	
Belanja RM	87.664.956.000	88.329.629.000	(664.673.000)
Belanja pegawai	45.109.709.000	45.224.382.000	(114.673.000)
Belanja barang	31.927.735.000	32.477.735.000	(520.000.000)
Belanja modal	10.627.512.000	10.627.512.000	0

2) Perbandingan Realisasi Belanja Negara

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
	LRA	CaLK	
Belanja RM	81.752.631.195	81.842.629.000	(90.011.209)
Belanja pegawai	46.111.371.116	46.201.382.325	(90.011.209)
Belanja barang	27.391.269.574	27.391.269.574	0
Belanja modal	8.249.990.505	8.249.990.505	0

d. Perbandingan Nilai Ekuitas Dana pada Neraca vs CaLK Tahun 2008

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai Menurut	
	Neraca	CaLK
Aset	110.140.631.587	110.140.631.587
Kewajiban	28.801.353	28.801.353
Ekuitas dana	110.111.830.234	110.111.330.234*

Keterangan :

terdapat kesalahan penghitungan nilai Ekuitas Dana yang seharusnya Rp110.111.830.234

Lampiran 11. Perbandingan Realisasi PNBP lainnya antara LRA Pendapatan Negara dan Hibah dengan CaLK

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
	LRA	CaLK	
Total PNBP lainnya	2.337.760.047	2.334.953.003	2.807.044
Pendapatan penjualan aset yang dihapuskan	400.000	400.000	0
Pendapatan sewa	12.238.958	12.638.958	(400.000)
Pendapatan jasa	3.206.743	-	3.206.743
Pendapatan bidang PHKA	1.807.611.530	1.807.611.530	0
Pendapatan penerimaan kembali belanja pegawai Tahun Anggaran yang lalu	487.240.515	487.240.515	0
Pendapatan pelunasan piutang/TGR	27.062.000	27.062.000	0
Pendapatan lain-lain	301	-	301

Lampiran 12. Perbandingan antara Nilai Aset Tetap dengan Nilai Belanja Modal menurut Laporan Keuangan Tahun 2008 Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagai UAPPA - W

a. Perubahan Nilai Aset Tetap dari Tahun 2007 ke Tahun 2008

No	Uraian	Tahun 2008	Tahun 2007	Perubahan Nilai Aset Tetap (Rp)
1.	Tanah	8.883.500.217	8.667.348.360	216.151.857
2.	Peralatan dan mesin	45.334.249.802	41.709.290.144	3.624.959.658
3.	Gedung dan bangunan	48.546.218.593	42.662.297.514	5.883.921.079
4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	6.222.947.190	5.585.590.294	637.356.896
5.	Aset lainnya	1.014.440.192	882.714.045	781.273.853
	Total	109.088.355.994	99.507.240.357	9.581.115.637

b. Nilai Belanja Modal Tahun 2008

No	Uraian	Tahun 2008
1.	Belanja modal tanah	127.000.000
2.	Belanja modal peralatan dan mesin	3.533.195.138
3.	Belanja modal gedung dan bangunan	2.082.973.323
4.	Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan	768.221.373
5.	Belanja modal fisik lainnya	-
	Total	6.511.389.834